

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian pelaksanaan Program KMN di Nagari Sungai Kamuyang dan Nagari Andaleh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Pembentukan Pokja KMN di Nagari Sungai Kamuyang telah melibatkan institusi lokal yang diselenggarakan oleh pemerintahan nagari melalui Musyawarah Nagari dengan mengikutsertakan *stakeholder* terkait. Berbeda halnya dengan yang dilaksanakan di Nagari Andaleh, proses pembentukan Pokja KMN tidak dilakukan melalui Musyawarah Nagari dan tidak mengikutsertakan *stakeholder* terkait melainkan didominasi oleh Wali Nagari. Pengelolaan KMN di Nagari Sungai Kamuyang telah dilaksanakan dengan cukup baik terlihat dari sebagian besar aturan yang ada telah dilaksanakan. Sementara itu di Nagari Andaleh Pengelolaan KMN dilaksanakan dengan kurang baik terlihat dari sebagian besar aturan yang belum dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan proses penetapan aturan modal bergulir dan kelompok penerima yang tidak dilakukan melalui Musyawarah Nagari.
2. Adanya keterkaitan antara proses pembentukan Pokja KMN dan pengelolaan KMN terhadap keberlanjutan Program KMN, terlihat pada proses pembentukan Pokja KMN di Nagari Sungai Kamuyang yang melibatkan *Stakeholders* terkait melalui Musyawarah Nagari serta pengelolaan KMN dengan aturan main *screening*, *incentive* dan *enforcement* yang membuat mekanisme sistem penyaluran melembaga dengan cukup baik sehingga mampu menjaga keberlanjutannya yang diikuti dengan keberlanjutan finansial dan keberlanjutan keanggotaan. Sementara proses pembentukan Pokja KMN di Nagari Andaleh yang didominasi oleh Wali Nagari dan pengelolaan KMN yang banyak di intervensi oleh pemerintah nagari membuat Pokja KMN Andaleh kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat dan tidak dapat mempertahankan keberlanjutan secara lembaga, secara finansial dan keanggotaannya.

B. Saran

Dari penelitian pelaksanaan Program KMN di Nagari Sungai Kamuyang dan Nagari Andaleh dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perlu melibatkan seluruh *stakeholders* terkait terutama kelompok-kelompok pemanfaat program dalam pembentukan organisasi pengelola program-program pengentasan kemiskinan berbasis kelompok yang harus memiliki sumberdaya yang berkomitmen tinggi dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat
2. Perlu independensi Pokja sehingga Pokja tidak dapat di interfensi oleh pemerintah nagari atau pihak lain. Dalam hal ini pengalokasian kredit tidak akan tepat sasaran jika adanya interfensi kepada Pokja.
3. Perlu adanya ketaatan terhadap aturan dan penegakan sanksi sehingga aturan dan sanksi melembaga di masyarakat

